

Sandiaga Uno, Menteri Terkaya di Kabinet Presiden Jokowi Jilid 2

JAKARTA (IM) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menjadi menteri terkaya kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) jilid dua versi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK periode 2019-2020.

Berdasarkan laporan harta kekayaan yang disorot Sandiaga ke KPK pada 9 Februari 2021, ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 3.815.767.386.190. Jumlah kekayaan itu terdiri dari 16 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang, Singapura, dan Amerika Serikat, yang totalnya mencapai Rp 208.944.126.444.

Kekayaan itu juga termasuk alat transportasi yang dimiliki oleh Sandiaga yaitu berupa dua unit mobil Nissan

senilai total Rp 295.000.000 juta. Politikus Partai Gerindra itu juga mempunyai harta bergerak lainnya senilai Rp 3.200.000.000, surat berharga Rp 3.111.823.057.480.

Ia juga memiliki Kas dan Setara Kas senilai Rp 629.217.144.021, dan harta lainnya sebesar 43.346.597.159. Selain itu, Sandiaga tercatat memiliki utang senilai Rp 181.058.538.914.

Harta Sandiaga ini mengalami penurunan dari sebelumnya. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan Sandiaga pada 14 Agustus 2018, saat ia mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2019, hartanya mencapai Rp. 5.099.960.524.965. Itu artinya Sandiaga mengalami penurunan harta sekitar Rp 1.284.193.138.775. ● mei

KPI Bantah Berupaya Damaikan Korban dan Pelaku Pelecehan Seksual

JAKARTA (IM) - Komisi Peniaran Indonesia (KPI) membantah berupaya untuk mendamaikan pegawainya yang menjadi terduga korban dan terduga pelaku pelecehan seksual serta perundungan.

Wakil Ketua KPI, Mulyo Hadi, mengakui pihaknya sempat memanggil terduga korban dan para terduga pelaku ke kantor KPI Pusat beberapa waktu lalu. Namun ia menyebutkan, pemanggilan itu hanyalah bagian dari kepentingan investigasi internal yang saat ini tengah berjalan.

"Kalau negosiasi damai sih enggak, mereka kan hadir dalam rangka mengumpulkan informasi yang kami butuhkan," kata Mulyo ditemui usai memberikan keterangan di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (15/9).

Jika pun ada upaya damai yang dibahas terduga korban dan terduga pelaku di Kantor KPI, Mulyo menyatakan hal itu sama sekali tidak melibatkan institusi KPI.

"Kalau itu (upaya damai) di luar kuasa kami. Antara inisiatif terduga korban dan

pelaku saja," ujarnya. Saat ditanya lebih jauh soal pertemuan di Kantor KPI itu, Mulyo enggan menjawab lagi dengan alasan saat itu dirinya sedang berada di luar kota.

"Kejadian (di kantor) KPI, tapi kalau anda menanyakan saya posisi saat itu sedang ada di Malang (Jawa Timur), ada kegiatan," katanya.

Soal pembahasan damai di Kantor KPI tersebut sebelumnya diungkapkan oleh kuasa hukum MS selaku terduga korban. Ketua tim kuasa hukum MS, Mehbob mengatakan, awalnya salah satu komisioner KPI menelpon kliennya pada 8 September. MS diminta untuk datang ke kantor KPI tanpa didampingi pengacara. Namun setelah MS tiba di sana, ia justru diminta meneken surat damai.

"Tiba-tiba tanpa adanya komisioner di sana, mungkin itu sudah skenario mereka, tiba-tiba sudah ada surat perdamaian. Dia disuruh tanda tangan," kata Mehbob, Jumat lalu. ● mei

2 Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER MENKUMHAM DENGAN BALEG DPR DAN DPD

Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menghadiri rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9). Rapat tersebut membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021.

Pemerintah Diminta Perketat Kedatangan WNA untuk Cegah Masuknya Varian Corona

Anggota DPR mengatakan, perjuangan masyarakat yang selama dua bulan lebih menjalani PPKM hendaknya diikuti dengan pembatasan kedatangan WNA dari luar negeri.

JAKARTA (IM) - Pemerintah diminta memperketat kedatangan warga negara asing (WNA), terutama dari negara-negara dengan banyak ditemukan kasus Covid-19 varian Mu, Lambda, dan C.1.2.

"Peringatan dan pengawasan itu gunaantisipasi dampak penyebaran Covid-19 varian Mu, Lambda dan C.1.2 yang saat ini menjangkiti puluhan negara," kata Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Rabu (15/9).

Sebab itu, menurutnya, bandara-bandara Internasional di Indonesia melakukan pengetatan kedatangan WNA dari negara-negara yang banyak kasus Covid-19 varian baru. Mufidayati mengusulkan

agar ada revisi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2021 agar semangat perlawanan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia benar-benar nyata.

"Terutama mereka yang mendapat ITAS tapi kembali ke negaranya lalu masuk lagi ke Indonesia harus ditolak dalam kondisi seperti ini," ujarnya.

Politikus PKS itu menuturkan, perjuangan masyarakat yang selama dua bulan lebih menjalani Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hendaknya diikuti dengan pembatasan kedatangan WNA dari luar negeri.

Terlebih, tiga varian baru di atas disebut dapat menurunkan kadar antibodi tubuh

dan dampak efikasi dari vaksin. "Jangan sampai angka vaksinasi kita yang belum cukup besar harus ditambah dengan ancaman tiga varian baru ini," ujar Mufida.

Ia juga mengingatkan bahwa World Health Organization telah memasukkan varian Mu dan Lambda sebagai variant of interest karena dianggap cukup mengancam, bisa menyebar lebih cepat, menyebabkan infeksi parah, dan lolos dari kekebalan yang diinduksi vaksin.

"Meski disebut penularannya tidak secepat varian Delta tapi disebut kebal terhadap vaksin. Kita mesti waspada sejak dini, jangan sampai kecolongan lagi," katanya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengungkapkan, pemerintah tengah mengamati tiga varian baru Covid-19 agar tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Sebagaiantisipasi, kita mengamati ada tiga varian baru yang kita amati dari dekat. Pertama adalah varian Lambda, kedua varian MU, dan yang ketiga adalah varian

C.1.2," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9).

Dalam situs resmi WHO dijelaskan, gejala orang yang terpapar virus Corona terbagi dalam dua kelompok, yaitu gejala umum dan gejala tidak umum. Gejala umumnya adalah seperti demam, batuk, kelelahan, kehilangan untuk merasa atau mencium bau.

Sementara gejala tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri pada dada, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, dan mata merah atau iritasi pada mata.

Lalu virus corona bermutasi menjadi berbagai jenis varian baru. Mutasi virus corona diketahui sejak akhir 2020. Dari sejak itu hingga akhir pertengahan September 2021, diketahui ada 9 mutasi yang dihasilkan oleh virus corona, yaitu:

1. Varian Mu, pertama kali diidentifikasi di Kolombia pada Januari 2021.
2. Varian Eta, pertama kali terdeteksi di beberapa negara pada Desember 2020.
3. Varian Iota, pertama kali

terdeteksi di AS pada November 2020.

4. Varian Kappa, pertama kali terdeteksi di India pada Oktober 2020.

5. Varian Lambda, pertama kali terdeteksi di Peru pada Desember 2020.

6. Varian Delta, pertama kali terdeteksi di India pada Oktober 2021.

7. Varian Alpha, pertama kali terdeteksi di UK pada September 2020.

8. Varian Beta, pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada Mei 2020.

9. Varian Gamma, pertama kali terdeteksi di Brasil pada November 2020.

WHO kemudian mengelompokkan sembilan varian baru virus corona tersebut terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut sebagai variants of interest (VOI), dan kelompok kedua disebut sebagai variants of concern (VOC).

Yang termasuk dalam kategori VOI varian Mu, Eta, Iota, Kappa, dan Lambda. Sedangkan varian yang termasuk pada kelompok VOC adalah Delta, Alpha, Beta, dan Gamma. ● han

FOTO: ANI



RDP BNPT DENGAN KOMISI III DPR

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Boy Rafli Amar (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja, penindakan dan pengungkapan kasus serta kebijakan, strategi dan program BNPT.

Pesawat Rimbun Air Jatuh di Lokasi Markas KKB Papua Pimpinan Zakius

INTAN JAYA (IM) - Pesawat Rimbun Air PK OTW, ditemukan dalam kondisi berkeping-keping. Diduga pesawat kargo tersebut menabrak gunung, setelah sebelumnya gagal mendarat karena kabut yang tebal. Kemudian, pesawat berusaha naik mengambil arah kiri bandara.

Pesawat carter milik PT Intan Angkasa itu mengangkut bahan bangunan dan juga bahan makanan milik Yonif 521/BY yang bertugas di Kabupaten Intan Jaya.

Wadanyon Yonif Mekanis 521/DY dari Pos Intan Jaya Satgas Pamrahan Yonif Mekanis 521/DY Mayor Inf Edi Dipramono mengatakan, koordinat jatuhnya pesawat Rimbun Air ditemukan oleh helikopter carteran Satgas Elang.

"Titiknya hanya 3,4 Km dari Bandara dan dari Pos Bilogai Satgas Yonif 501 hanya berjarak 2,2 Km," ujarnya Rabu (15/9/2021).

Lokasi jatuhnya pesawat carter tersebut merupakan markas teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

pimpinan Zakius. "Sesuai perintah Kapoles Intan Jaya yang gerak ke TKP masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan Satgas intrl. Karena Kelompok OPM pimpinan Zakius yang menguasai lokasi tersebut," tandasnya.

Sekadar diketahui pada hari Rabu (15/9) sekitar Pukul 07.37 WIT telah didapat Informasi terjadinya hilang kontak Pesawat Rimbun Air Pk OTW di Distrik Sugapa Kab. Intan Jaya dari Kabupaten Nabire.

Informasi yang diterima redaksi sekitar Pukul 06.40 WIT, Take off dari Kabupaten Nabire menuju Kabupaten Intan Jaya dengan membawa Cargo berupa bahan bangunan.

Pukul 07.30 WIT, Airnav Sugapa melakukan komunikasi terakhir dengan Pilot sebelum hilang kontak. Hingga saat ini tidak adanya Kontak dari Pesawat Rimbun Air PK OTW. Adapun Identitas Kru Pesawat diantaranya HA. Mirza (Pilot), Fajar (Copilot) dan Iswahyudi (Engineering). ● han

ICW Pertanyakan Inisiator Surat Permohonan Pegawai KPK Nonaktif Ditempatkan di Instansi Lain

JAKARTA (IM) - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan mengenai inisiator surat permohonan pegawai KPK nonaktif agar ditempatkan di instansi lain.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mempertanyakan hal tersebut karena ia mendapat informasi bahwa surat permohonan itu justru berasal dari internal KPK.

"Berdasarkan informasi yang ICW peroleh, metadata surat itu justru berasal dari pegawai internal, khususnya Biro SDM KPK," ujar Kurnia, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9).

"Tidak hanya itu dari sejumlah pemberitaan ditemukan bahwa tawaran untuk pindah ke BUMN datang dari pejabat struktural KPK, namun dengan syarat mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu," katanya.

Kurnia menegaskan, jika hal itu benar maka Komisioner KPK Nurul Ghufron telah mengeluarkan pernyataan bohong karena menyebut tidak tahu perihal surat tersebut.

"Logika sederhananya bagaimana mungkin surat yang dibuat oleh pegawai internal KPK atau ajakan dari pejabat struktural KPK tanpa sepengetahuan komisioner?" kata Kurnia.

Ia mengatakan, penyaluran pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ke sejumlah instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini benar, maka perlu dikonfirmasi kebenarannya ke Menteri BUMN Erick Thohir.

Selain itu, KPK juga mesti menjelaskan dasar hukum penyaluran pegawai KPK ke instansi lain dan instansi apa yang dimaksud.

"Ketika KPK tidak mendasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan ketika menyalurkan pegawai, maka diduga telah menjadi praktik memperdagangkan pengaruh yang dilakukan oleh Pimpinan KPK," imbuhnya.

Sebelumnya beredar isu sejumlah pegawai KPK nonaktif mendapat tawaran untuk bekerja di instansi BUMN.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa menjelaskan permintaan tersebut disampaikan oleh para pegawai.

Cahya menjelaskan, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada instansi di luar KPK. Namun demikian untuk dapat bekerja di instansi yang dituju, mekanisme dan standar rekrutmen diserahkan pada instansi masing-masing.

Terpisah, Komisioner KPK Nurul Ghufron membantah adanya surat permintaan pengunduran diri dan diusulkan bergabung ke BUMD dari Pimpinan KPK pada pegawai nonaktif.

"Yang jelas form-nya saya enggak tahu, kalau ditawari, itu bukan ditawari, mereka itu katanya sih, ya, mereka nanya masa sih pimpinan enggak memikirkan mereka. Begitu," kata Ghufron dalam keterangan tertulis, Selasa kemarin.

Ghufron menegaskan, tidak ada permintaan dari pimpinan KPK agar pegawai yang tak lolos TWK untuk mengundurkan diri. ● han

KPK Usut Oknum Pegawainya yang Disebut Terima Rp650 Juta dari Bupati Kuansing

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegakkan bahwa pihaknya serius mencari dan mengusut oknum pegawainya yang disebut menerima uang Rp650 juta dari mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini.

Inspektoral KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau untuk mendapatkan lebih jelas informasi tersebut. "Inspektoral KPK telah bergerak dan menindaklanjuti informasi ini secara serius dengan berkoordinasi bersama pihak Kejaksaan Tinggi Riau untuk menggali lebih detail informasi awal ini, guna mengungkap siapa sebenarnya oknum yang mengaku sebagai pegawai KPK tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (15/9).

Lebih lanjut, kata Ali, pihaknya juga telah meminta izin kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk bisa mengikuti jalannya persidangan dugaan korupsi dengan terdakwa Mursini secara daring. Hal itu, guna mendapatkan informasi lebih jelas soal siapa oknum pegawai KPK yang disebut telah menerima uang dari mantan Bupati Kuansing.

"KPK juga telah meminta kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk bisa mengikuti sidang pemeriksaan Terdakwa Mursini yang akan digelar pada beberapa pekan ke depan secara daring," jelasnya.

Sejauh ini, KPK sudah mengantongi beberapa informasi ihwal sosok oknum pegawainya yang diduga menerima uang dari Mursini. Namun, kata Ali, sosok oknum pegawai KPK tersebut masih samar-samar.

"KPK baru memperoleh informasi mengenai ciri fisik

oknum dimaksud yang masih bersifat umum dan abstrak. Bahkan dari keterangan para saksi pun, belum diketahui nama dari orang yang mengaku sebagai pegawai KPK tersebut," terangnya.

Ali mengatakan bahwa inspektoral KPK juga terus melakukan pemeriksaan di unit-unit internal untuk mengusut dugaan pemberian uang tersebut. Termasuk, pengecekan perjalanan dinas pegawai ke wilayah Riau, Pangkal Pinang, dan sekitarnya pada rentang waktu 2016-2017 sebagaimana peristiwa itu terjadi.

"Meskipun peristiwanya telah lampau yaitu di tahun 2017, kami sekali lagi sampaikan bahwa KPK sangat serius untuk memastikan pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi oleh insan KPK dilakukan secara profesional dan tidak menyalahi kaidah-kaidah hukum," tegas Ali.

"Sehingga kami berharap, pihak Terdakwa bisa membantu KPK untuk mengungkap secara terang mengenai kronologi, positioning oknum dalam perkara ini, dan tentu ciri-ciri fisik yang lebih spesifik," katanya menambahkan. ● mei



RDP BPJS KETENAGAKERJAAN DENGAN KOMISI IX DPR

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri (kanan) berbincang dengan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo (kiri) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9). Rapat tersebut membahas evaluasi tindak lanjut rekomendasi atas temuan BPK terhadap investasi BPJS Ketenagakerjaan dan penjelasan tentang program perluasan peserta BPJS Ketenagakerjaan pasca Inpres No. 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.

IDN: ANI

PENGUMUMAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini PT. WV INTERNASIONAL (WV) yang berkedudukan di Jakarta, mengundang segenap para ahli waris pemegang saham perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 September 2021
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Jl. Gading Elok Utara Raya Blok FB2, RT.15/RW.11, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Agenda :
- Perubahan Modal Setor Perseroan.
- Laporan keuangan dan Pertanggungjawabannya.

Demikian Undangan ini Kami Sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Jakarta, 16 September 2021
Ahli Waris Komisaris
PT. WV INTERNASIONAL

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES LIKUIDASI PT. KANABANG ASRI KAMPAS (dalam likuidasi)

Dengan ini diumumkan bahwa proses likuidasi PT. KANABANG ASRI KAMPAS (dalam likuidasi) ("Perseroan") telah selesai berdasarkan keputusan RUPS. RUPS telah menerima laporan pertanggungjawaban likuidator dan membebaskan likuidator terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam proses likuidasi. Sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan.

Jakarta, 16 September 2021
Likuidator PT. KANABANG ASRI KAMPAS (dalam likuidasi)